

## Dampak Monarki Konstitusional bagi Partisipasi dan Demokrasi Rakyat Thailand Periode Raja Maha Vajiralongkorn

<sup>1</sup>Felix Marshal, <sup>2</sup>Dina Thalentaria Nainggolan, <sup>3</sup>Aqil Fajri Hidayat, <sup>4</sup>Liosantra

Oskar

Email: [2110413184@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2110413184@mahasiswa.upnvj.ac.id), [2110413178@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2110413178@mahasiswa.upnvj.ac.id),  
[2110413167@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2110413167@mahasiswa.upnvj.ac.id), [2110413192@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2110413192@mahasiswa.upnvj.ac.id)

### Abstrak

Partisipasi dan Demokrasi adalah satu hal yang saling terikat, seperti halnya contoh dalam melakukan suatu perpolitikan. Dalam sebuah demokrasi harus ada sebuah partisipasi apapun bentuknya, seperti partisipasi pemerintahan maupun partisipasi rakyat dalam perpolitikan. Tetapi pada prakteknya banyak dari pihak rakyat yang kecewa akan politik yang berdemokrasi, partisipasi dalam perpolitikan dinilai sangat rendah dikarenakan menurunnya kepercayaan rakyat terhadap pemegang pemerintahan yaitu politisi elit. Hal ini menimbulkan kritik yang terus dilontarkan oleh rakyat akan Partisipasi dan Demokrasi dalam sebuah kewarganegaraan. Negara Thailand sendiri menganut sistem Monarki Konstitusional dalam pemerintahannya tetapi dalam kasusnya banyak masyarakat Thailand yang tidak menyukai pemerintahan Monarki tersebut dikarenakan kita bisa melihat dari UU yang telah dibuat yaitu UU Lese Majeste yang dimana dinilai masyarakat Thailand sebagai tembok untuk menutupi Demokrasi dan Partisipasi masyarakat dalam negaranya tersebut.

**Kata Kunci:** Partisipasi, Demokrasi, Lese Majeste, Sistem Monarki Konstitusional, Politik, Rakyat.

### Abstract

*Participation and democracy are intertwined things, as is an example of doing politics. In a democracy there must be a participation in any form, such as government participation or people's participation in politics. But in practice many of the people are disappointed with democratic politics, participation in politics is considered very low due to the decline in people's trust in government holders, namely elite politicians. This raises criticism that the people continue to raise about Participation and Democracy in a citizenship. The state of Thailand itself adheres to a constitutional monarchy system in its government, but in this case many Thai people do not like the monarchy because we can see from the laws that have been made, namely the Lese Majeste Law which is considered by the Thai people as a wall to cover democracy and public participation in their country.*

**Keywords:** Participation, Democracy, Lese Majeste, Constitutional Monarchy System, Politics, People.

## Pendahuluan

Partisipasi merupakan sebuah kegiatan yang menimbulkan hasrat perasaan untuk mengikutsertakan individu dalam sebuah kegiatan suatu Organisasi atau Kelompok. Bentuk partisipasi masyarakat Thailand dalam perpolitikannya memang harus dipertanyakan. Banyak masyarakat Thailand yang kurang berpartisipasi ini disebabkan oleh bentuk Demokrasi itu sendiri pada pemerintahan negara ini. Pemerintahan Thailand memegang sistem yang sebenarnya sudah tidak relevan pada zaman ini.

Thailand menganut sistem Monarki Konstitusional pada pemerintahannya, tetapi pada prakteknya masyarakat Thailand merasakan ada kejanggalan pada sistem Monarki tersebut, mereka merasakan bahwa sistem yang dilakukan pada prakteknya tetap Monarki Absolut. Kita bisa melihat praktek ini dengan contoh pemerintah Thailand yang mengesahkan Undang-undang Lese Majeste. UU Lese Majeste ini digunakan untuk mencegah adanya penghinaan atau kritikan dari masyarakat kepada Raja. Oleh karena itu praktik partisipasi atas kebebasan pendapat masyarakat Thailand ini dirasa tidak berjalan dengan baik atas asas Demokrasi.

Perubahan sistem yang terjadi di Negara Thailand dari monarki absolut yang berhenti di tahun 1932, lalu menjadi monarki konstitusional hingga sekarang. pesatnya perkembangan di negara thailand akibat dari perubahan yang terjadi dari bentuk geografis berdampak pada segala aspek di negara thailand. sistem monarki konstitusional memberikan ruang yang lebih bebas kepada kerajaan tetapi tidak sepenuhnya bebas karena tetap diatur didalam konstitusional yang berlaku di negara thailand. maka secara otomatis walaupun bukan perubahan yang besar tetapi Negara Thailand masih bersikap otoriter terhadap masyarakatnya.

Terlihat perubahan yang terjadi dianggap membawa perubahan “modernisasi” dari sistem yang tidak harus berakar kepada demokrasi, tetapi ke arah otoriterisme. hal ini yang kemudia menjadi perubahan bagi sistem

monarki di negara thailand yang disebut revolusi siam 1932. saat ini negara Thailand telah menjadi monarki konstitusional yang mana segala keputusan tertinggi ada di konstitusi dan raja tetap menjalankan tugasnya sebagai raja tetapi tidak melanggar aturan aturan yang sudah ditentukan. hal ini menjadi masif hingga sekarang karena kerajaan konstitusional seharusnya dipegang oleh rakyat sebagai konstitusional seperti yang dikatakan “Konstitusi harus datang dari rakyat,” kata pemimpin aksi, Jatupat “Pai Daodin” Boonpattaraksa, kepada massa di Bangkok.

Problem yang selalu dirasakan oleh rakyat di Thailand membawa perlawanan bahwasanya pemerintah seharusnya memikirkan rakyatnya dan tidak segelintir orang diatas saja. Hal ini perlu menjadi revolusi besar-besaran bagi Thailand karena menjadi diujung tanduk negara Thailand ini akan berdiri. Banyak sekali tuntutan tuntutan dari rakyat untuk memperbaiki sistem pemerintahan Thailand yang kian hari makin bobrok.

Untuk menghindari pembahasan yang semakin luas. Peneliti memfokuskan pembahasan pada pengaruh monarki konstitusional di dalam partisipasi dan demokrasi rakyat Thailand. Berdasarkan fokus permasalahan di atas. Maka dapat dirumuskan pertanyaan pokok pada kajian penelitian ini yaitu: Bagaimana dampak monarki Konstitusional bagi Partisipasi dan Demokrasi di Negara Thailand Periode Raja Maha Vajiralongkorn?

## **Tinjauan Pustaka**

### **1. Teori Behaviorisme**

Teori ini menjelaskan bagaimana tindakan individu dalam melakukan kegiatan politik, serta peran sebagai partisipasi mampu memahami pengetahuan politik dan bagaimana bentuk pengaruh yang diberikan terhadap pengetahuan politik. Dalam dunia psikologi, tingkah laku dapat dijelaskan melalui maksud dan tujuan tertentu berdasarkan hasrat yang mendorong manusia untuk ikut berpartisipasi dalam perpolitikan, hal tersebut tentu

berdasarkan motivasi yang akan berdampak terhadap proses pemahaman dan belajar. Melalui teori ini dapat menjelaskan bagaimana keterkaitannya dengan kegiatan partisipasi warga Thailand yang sering kali menuai kontroversi antara pemerintah dengan masyarakatnya karena ketimpangan kekuasaan karena pemerintah terlalu berkuasa sehingga membuat masyarakat Thailand kurang menghargai setiap kebijakan atau keputusan pemerintah karena sikap pemerintah juga anti kritik.<sup>1</sup>

## **2. Teori Demokrasi Konstitusional**

Dalam Teori ini dijelaskan bahwa yang duharapkan dalam demokrasi adalah bagaimna konstitusional berjalan dengan sebagai dasar yaitu konstitusi, konstitusi disini yang seharusnya memiliki pembatas untuk bentuk wewenang suatu negara dalm pelaksanaan demokrasi atau bisa dikatakan pemerintah, serta dari pada itu segala bentuk peraturan demokratis dalam penyelenggaraan. Nilai dari konstirusinal ini minimal memiliki 2 esensi : pertama, rancangan negara hukum harus dijelaskan bahwa negara hukum secara keseluruhan harus memiliki wibawa hukum dan sudah seharusnya setiap kekuasaan yang dimiliki pemerintah itu harus mapu untuk mengontrol dan mengendalikan politik. selanjutnya yang kedua, draf hak-hak sipil harus berdasarkan warga negara yang terjamin dalam memiliki kebebasan warga negara serta memiliki jaminan konstitusi dan memiliki batasan kekuasaan negara yang legitimasinya mendasar dalam mendapatkan konstitusi.

## **3. Teori Rasionalisme**

Didalam teori rasionalisme ini dijelaskan tentang sebuah gagasan dasar mengenai tindakan seseorang yang bertujuan pada pilihan atau nilai. Melalui teori Coleman sebagai aktor sumber daya memiliki dua unsur untuk

---

<sup>1</sup> Nasiwan, Teori-teori Politik (Yogyakarta: Ombak, 2010), hlm. 34.

menjelaskan teori ini. Dijelaskan bahwa sumberdaya itu sendiri sebagai daya tarik untuk mendapatkan perhatian yang nanti akan dikontrol oleh aktor. Aktor disini dianggap sebagai seseorang yang memiliki tujuan, sebagai aktor memiliki hak dasar untuk memiliki dan menentukan untu itu memiliki pertimbangan yang sangat mendalam dan mendasar melalui kesadarannya, aktro itu sendiri memiliki hak untuk memilih dan mennetukan tindakan apa yang akan diambil. Dalam hal ini aktor sebenarnya adalah pemerintahan di Thailand sendiri, seperti bagaimana raja memberikan sebuah kebijakan atau keputusan berdasarkan tujuan terntu yang nantinya akan berdampak terhadap masyarakatnya, hal ini tindakan aktor yaitu pemerintah tidak selalu dianggap benar oleh masyarakat maka dari itu, masyarakat Thailand sebagai sumber daya akan memberikan pendapat terhadap tindakan pemerintah Thailand.<sup>2</sup>

## Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan *library research*. Data-data diperoleh dari jurnal-jurnal, buku dan dokumentasi lainnya. Dari data tersebut, penulis melakukan literasi seperti membaca, mencatat, dan mengatur berbagai sumber-sumber penelitian. Dalam mengumpulkan data, tulisan ini berdasarkan pengumpulan data sekunder. Pengumpulan data sekunder untuk mengelola data bisa didapatkan melalui internet, jurnal, dan media online lainnya. Penulis mengumpulkan data dengan menganalisis berbagai sumber yang ditemukan, kemudian akan mendapatkan banyak perbandingan yang akan berakhir kepada sebuah deskripsi dalam menggambarkan topik tulisan ini yaitu mengenai partisipasi dan demokrasi pada Negara Thailand.

---

<sup>2</sup> George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda* (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), hlm. 394.

## Hasil Penelitian dan Pembahasan

### Dampak Monarki Konstitusional bagi Partisipasi dan Demokrasi di Negara Thailand Periode Raja Maha Vajiralongkorn

Miriam Budiardjo menjelaskan bahwa partisipasi politik secara umum dijelaskan sebagai kegiatan seseorang atau sekelompok orang yang ikut secara aktif dalam kehidupan politik itu sendiri, yaitu dengan mengikuti pemilihan pemimpin Negara secara langsung atau tidak langsung akan mempengaruhi kebijakan publik (*public policy*) pada wilayah tersebut. Bentuk kegiatan ini seperti tindakan memberikan hak suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat, menjadi anggota partai atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, dan sebagainya. Oleh karenanya, di negara-negara demokrasi menganggap jika banyaknya masyarakat yang berpartisipasi, maka akan lebih baik. (Miriam Budiardjo, 2008:369).

Dalam implementasi realitanya angka tingkat partisipasi politik ternyata menunjukkan bahwa warga negara mengikuti dan memahami masalah politik dan mereka melibatkan diri dalam kegiatan- kegiatan politik tersebut. Sebaliknya, tingkat partisipasi yang rendah pada umumnya sebagai tanda tidak baik karena hal ini dapat dilihat bahwa banyak warga yang tidak menaruh perhatian permasalahan negara dan politik (Miriam Budiardjo, 2008:369).

Menurut Slamet (2003:8) Valderama menunjukkan dalam Arsito bahwa konsep partisipasi mencakup tiga bentuk, yaitu:

1. Politik: Politik lebih mementingkan “pengaruh” dan “kedudukan” anggota parlemen dalam lembaga negara daripada partisipasi aktif mereka dalam proses pemerintahan itu sendiri.
2. Warga: Di sini warga menekankan partisipasi warga dalam pengambilan keputusan di berbagai lembaga dan sistem administrasi. Peran warga negara di sini mengubah konsep partisipasi sebagai “kepedulian terhadap

mereka yang diuntungkan atau disingkirkan” dalam politik dan pengambilan keputusan di beberapa bidang utama yang mempengaruhi kehidupan mereka, sehingga mengubah bentuk kepentingan partisipasi sipil.

3. Sosial: Kepentingan sosial yang diidentifikasi sebagai penerima manfaat/pemangku kepentingan di luar proses pembangunan untuk saran atau pengambilan keputusan di semua tahap proyek pembangunan pemerintah, mulai dari analisis kebutuhan masyarakat hingga pemantauan, implementasi, evaluasi, dan terakhir evaluasi. Meningkatkan hasil dari setiap keputusan untuk menghasilkan keputusan yang populis.

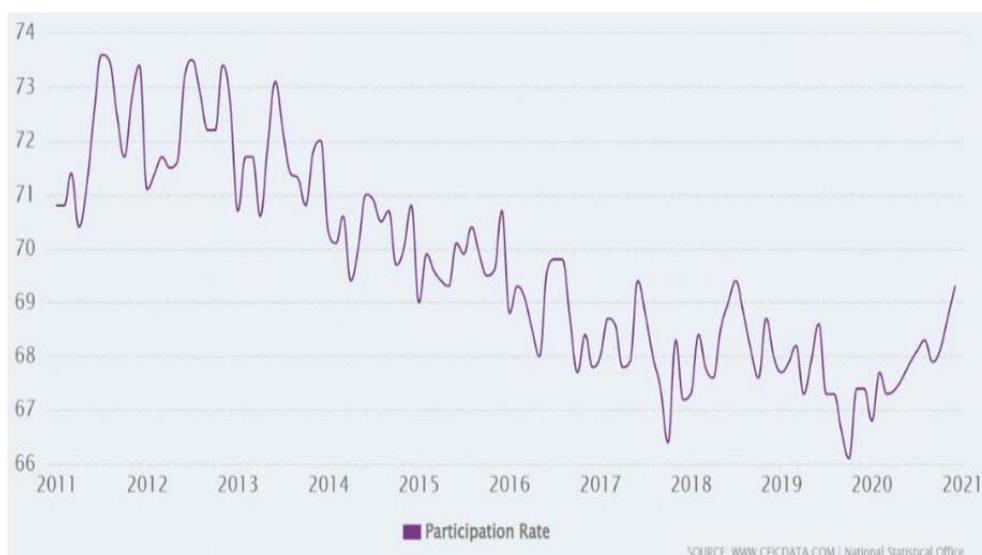
Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa segala bentuk partisipatif bukan hanya penerapan tujuan pembangunan sosial, tetapi juga merupakan bagian penting dari proses-proses yang terjadi terhadap pembangunan sosial. Kondisi partisipatif dalam komunitas mengandaikan adanya manusia seutuhnya, dan tuntutan partisipan dalam masyarakat semakin sejalan dengan pemahaman akan hak dan kewajiban di suatu negara tersebut. Perencanaan partisipan disusun melalui diskusi kelompok terbimbing atau terdidik, terutama dalam merumuskan setiap program baru dalam pembangunan yang sangat diperlukan masyarakat. Kelompok masyarakat strategis dianggap sebagai kelompok yang memahami peluang, permasalahan, kondisi, keterbatasan & kepentingan kebutuhan primer serta sekunder di masyarakat, serta dipercaya untuk melaksanakan program pembangunan secara efisien dan efektif.

Di Negara Thailand bentuk partisipasi masyarakat terbagi dalam tiga fokus yaitu:

1. Partisipasi Politik di Thailand dapat dilihat dari Parlemen Thailand yang diperkirakan akan membentuk sebuah komite untuk merancang konstitusi baru. Mekanisme serupa diterapkan pada tahun 2016 ketika

pemerintah militer membentuk Dewan Nasional untuk Perdamaian dan Ketertiban Thailand (NCPO).

2. Partisipasi Warga di Thailand bisa juga dilihat salah satu rancangan paling kontroversial, tetapi populer di kalangan pengunjung rasa, diproduksi oleh Internet Law Reform Dialogue (iLaw), sebuah koalisi LSM progresif. Sebuah petisi untuk mengubah apa yang mereka sebut "RUU Rakyat" mendapat dukungan dari sedikitnya 100.000 orang. disini partisipasi warga dapat dilihat karena mendapatkan dukungan dari 100.000 orang warga Thailand.
3. Partisipasi Social di Thailand juga dapat dilihat Tujuh amandemen konstitusi akan dibahas dan disetujui selama dua hari ke depan. Selama waktu ini, dua parlemen Thailand, Dewan Rakyat dan Senat, akan mengadakan sesi bersama yang dimulai dengan debat dan diakhiri dengan pemungutan suara. disini partisipasi social manfaat bahwa amandemen konstusi harus segera diperbaiki yang akhirnya mengambil sebuah keputusan di pemungutan suara.



**Tabel Persentase Partisipasi Thailand Tahun 2011-2021**

Dalam tabel diatas terlihat banyaknya angka Partisipasi Angkatan Kerja Thailand sebesar 68.2 % pada tahun 2022 ke-tujuh. Angka tersebut turun jika dibandingkan dengan sebelumnya yaitu 69.2 % pada 2022 bulan ke-enam. Data banyaknya Partisipasi Angkatan Kerja Thailand selalu diperbarui setiap bulannya, adapun rata-rata 69.4 % dari 2011 bulan pertama sampai 2022 ke-tujuh, angka tersebut didapatkan oleh 124 observasi yang dilakukan. Data mencatat angka tertinggi yaitu 73.6 % pada 2011 bulan ke-tujuh dan angka terendah sebesar 66.1 % pada 2019 bulan ke-sepuluh. Data banyaknya Partisipasi Angkatan Kerja Thailand ditetapkan sebagai berstatus aktif di CEIC juga dilaporkan oleh National Statistical Office. Data tersebut dikategorikan dalam Thailand Global Database.

Masyarakat Thailand pada praktiknya menginginkan Demokrasi Konstitusional atau demokrasi yang dimana kekuasaan pemerintahannya terbatas dan tidak boleh mengintervensi atau bercampur tangan dan bertindak sewenang-wenang terhadap warganya yang dimana biasanya Demokrasi Konstitusional ini bersandar pada sebuah Undang-undang dasar. Tetapi pada prakteknya pemerintahan Thailand tidak menggunakan demokrasi konstitusional yang dimana salah satu contohnya adalah kebebasan berpendapat. Pemerintahan Thailand membatasi kebebasan berpendapat yang bisa dilihat dari undang-undang Lese Majeste yang dimana masyarakat tidak boleh mengkritik serta memberikan tanggapan terkait pemerintahan raja tersebut. Dalam contoh demokrasinya dan partisipasinya yaitu masyarakat Thailand sering melakukan demonstrasi terhadap pemerintahan Raja Vajiralongkorn dikarenakan UU Lese Majestinya tersebut. Masyarakat menginginkan reformasi yang dimana bermaksud untuk merubah sistem Monarki Konstitusional tersebut menjadi yang lebih Demokrasi seperti Demokrasi Konstitusional tersebut.

## **Kesimpulan**

Dampak pemerintahan Monarki Konstitusional di Thailand bagi partisipasi dan demokrasi di Negara Thailand ini dapat dilihat dari masyarakat tidak diberikan kebebasan berpendapat terhadap raja ataupun pemerintahannya. Hal ini kita bisa lihat dari beberapa demonstrasi yang dilakukan masyarakat Thailand terutama di Kota Bangkok, mereka menuntut akan sebuah reformasi atas pemerintahan kerajaan tersebut. Tetapi berbeda dengan reformasi yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998, mereka ingin reformasi ini terjadi bukan untuk menggulingkan negara ini, namun mereka hanya ingin mengganti sistem Pemerintahan Monarki tersebut untuk lebih Demokrasi, dengan Demokrasi tersebut mereka mengharapkan pemerintahan yang lebih baik dan memiliki hak dan kebebasan mereka. Guna membuka iklim kebebasan di Thailand perlu dilakukan amandemen supaya partisipasi dan demokrasi bisa terwujud dan tingkat kesejahteraan masyarakat dapat terwujud tanpa memunculkan anarkis.

## Referensi

- George Ritzer. 2007. Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda. Jakarta: Rajawali Pers. hlm. 394.
- Handayani, Suci. 2006. Perlibatan Masyarakat Marginal Dalam Perencanaan dan Penganggaran Partisipasi (Cetakan Pertama). Surakarta: Kompip Solo
- Isbandi, Rukminto Adi. 2007. Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas: Dari Pemikiran Menuju Penerapan. Depok: Fisip UI press
- Nasiwan. 2010. Teori-teori Politik. Yogyakarta: Ombak hlm. 34
- Slamet, M. 2003. Membentuk Pola Perilaku Manusia Pembangunan. Bogor: IPB Press
- Supriady, Deddy dan Riyadi. 2005. Perencanaan Pembangunan Daerah. Jakarta: SUN
- Suryono, Agus. 2001. Teori dan Isi Pembangunan. Malang: Universitas Negeri Malang. UM Press.
- Yuwono, Teguh. 2001. Manajemen Otonomi Daerah : Membangun Daerah Berdasar Paradigma Baru. Semarang: Ciyapps Diponegoro University.